

BAB V

KESIMPULAN

Kajian demografi atau kependudukan menjadi salah satu isu yang banyak dibahas oleh berbagai negara di dunia. Permasalahan demografi menjadi isu dunia karena permasalahan ini dapat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan. Demografi yang berkaitan erat dengan kependudukan memiliki peran yang cukup penting dalam struktur negara dimana tidak dapat dianggap sebelah mata. Perubahan demografi maupun transisi demografi dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diawasi pergerakannya. Perubahan demografi yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai permasalahan baru dalam kehidupan suatu negara seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Tanpa disadari, dunia internasional telah mengalami permasalahan demografi yang mana berupa *over population* dimana jumlah populasi dunia meningkat dengan begitu pesat. Fenomena kelebihan penduduk ini dianggap sebagai suatu ancaman terbesar bagi bumi. Dengan banyaknya jumlah penduduk bumi, ada kekhawatiran bahwa sumber daya alam (SDA)—makanan, air dan energi—yang ada di bumi tidak mampu memenuhi kebutuhan semua penduduk. David Satterthwaite dari *International Institute for Environment and Development* di London menyatakan: “*It is not the number of people on the planet that is the issue—but the number of consumers and the scale and nature of their consumption.*”

Permasalahan demografi atau kependudukan ini sebenarnya telah banyak dialami oleh hampir semua negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang cenderung mengalami permasalahan berupa *over population*, sedangkan negara maju mengalami permasalahan yang berupa *declining population* maupun *aging population*.

Permasalahan krisis demografi di Jepang ini disebabkan karena rendahnya tingkat pernikahan dan juga kelahiran di Jepang. Biaya hidup yang makin tinggi membuat masyarakat Jepang menunda pernikahan atau memiliki untuk tidak menikah. Jika menikah pun, mereka akan menunda atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Hal ini tak hanya berakibat pada penurunan jumlah populasi Jepang, namun juga berakibat pada menyusutnya angkatan kerja di Jepang. Tak hanya itu saja, Jepang pun mengalami permasalahan lain yang mana berupa *aging population* yaitu ketika populasi suatu negara lebih didominasi oleh penduduk usia 65 tahun keatas. Ketika penduduk lansia jumlahnya bertambah padahal tidak ada regenerasi penduduk usia muda, maka beban negara dalam mendukung masyarakatnya akan semakin berat.

Permasalahan kekurangan tenaga kerja di Jepang akan sangat berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan negara Jepang sendiri. Maka dari itu, pemerintah Jepang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja ini, pemerintah Jepang pun telah berusaha untuk mengatasi akar permasalahan kekurangan tenaga kerja ini dengan berbagai upaya seperti meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di Jepang; memberdayakan wanita dan lansia dalam angkatan kerja di Jepang; serta mengembangkan teknologi robot yang mana merupakan keunggulan yang dimiliki Jepang. Upaya-upaya tersebut meskipun tidak mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja secara tuntas, setidaknya dapat membantu mengurangi krisis tenaga kerja. Upaya lain yang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja yaitu dengan membuka pintu imigrasi bagi tenaga kerja asing di Jepang. Meskipun masih banyak menghadapi pro kontra, namun solusi ini dirasa tepat.

Dengan mengaitkan permasalahan tersebut dengan kerangka dasar pemikiran yang digunakan yaitu kerjasama internasional, maka hal ini sesuai dengan hipotesa yang telah dirumuskan di bab awal. Hipotesa yang ada terbukti benar

adanya dimana selain melakukan upaya-upaya diatas, pemerintah Jepang pun mengatasi kekurangan tenaga kerja ini secara eksternal yaitu dengan menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia dan Filipina melalui skema *Technical Intern Training Program* (TITP) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Jepang menjalin kerjasama internasional dalam skema TITP dan EPA tersebut karena pemerintah Jepang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan membutuhkan bantuan dari negara lain. TITP dan EPA ini merupakan kerjasama internasional yang sama-sama melakukan transfer tenaga kerja dari negara-negara berkembang ke Jepang.

Setidaknya pemerintah Jepang melakukan kerjasama melalui skema TITP dengan beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, India, Laos, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, dan lain sebagainya. Sedangkan melalui skema EPA, pemerintah Jepang pun juga banyak melakukan kerjasama serupa dengan beberapa negara namun penelitian ini hanya difokuskan pada *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement* (JIEPA) dan *Japan-Philippines Economic Partnership Agreements* (JPEPA). Kerjasama internasional ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Jepang secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran di negara tersebut. Dari sisi Jepang pun, Jepang sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama ini yang mana dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang.